



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU**

LKIP

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah**

2024



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 27 Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH



Drs. JASMONO, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 telah selesai disusun.

LKIP BKD Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen dan laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BKD Provinsi Maluku yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala LAN RI No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah kepada masyarakat, LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian sasaran dan target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku secara berkala selama kurun waktu satu tahun. Selain itu LKIP juga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Srategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja tahun 2024

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dapat menjadi media untuk mengevaluasi kinerja BKD selama satu tahun terakhir agar dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak kepada kinerja OPD sehingga lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya.

Ambon, Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU



Dra. H. T. SOAMOLE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196508131992092001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semua harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur yang



Salah satu konsekuensi logis dari kondisi dan posisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku harus mampu meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama dalam menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, jujur dan transparan.

Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

1.2 Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018-2023. Dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



GAMBAR 1.1
Cascading BKD

GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU			
SASARAN : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip <i>Good Governance</i>			
INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi			
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU			
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN			
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN			
INDIKATOR : 1.1. Nilai Sistem Merit Provinsi Maluku			
1.2. Nilai SAKIP BKD			
SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN MUTASI	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
SASARAN PEJABAT ADMINISTRATOR			
1.1 Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	1.3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebutuhan ASN,	1.5 Meningkatkan Kualitas promosi dan mutasi berdasarkan sistem merit	1.7 Meningkatkan Manajemen kinerja, Penghargaan dan Disiplin ASN yang berdasarkan sistem merit
1.2. Meningkatnya Layanan Kepegawaian dan Umum	1.4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian berbasis sistem informasi	1.6 Meningkatkan kualitas pengembangan karier ASN yang berdasarkan sistem merit	
SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN MUTASI	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
INDIKATOR PEJABAT ADMINISTRATOR			



1.1.1. Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah	1.3.1 Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	1.5.1 Nilai Aspek promosi dan mutasi	1.7.1 Nilai Aspek Manajemen Kinerja
1.1.2. Persentase Pelaporan Keuangan yang tepat waktu pada Badan Kepegawaian Daerah	1.3.2 Nilai Aspek Pengadaan ASN	1.6.1 Nilai Aspek Pengembangan Karier	1.7.2 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
1.2.1. Jumlah dokumen Layanan Umum dan Kepegawaian	1.4.1 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian		1.7.3 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan

1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

GAMBAR 1.2
SOTK BKD



Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 Tugas dan Fungsi

1.3.1.1 Kepala BKD Provinsi Maluku

Kepala BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian.

1.3.1.2 Sekretariat

Sekretaris BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan asset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.3.1.3 Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kebutuhan ASN, pengadaan ASN, informasi



kepegawaian, fasilitasi profesi ASN dan penataan arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas menyusun formasi pegawai ASN, dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan prosedur dan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun dan merencanakan rencana kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana fasilitasi kelembagaan profesi ASN, fasilitas pengelolaan administrasi, kepegawaian dan kegiatan organisasi serta menata arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1.3.1.4 Bidang Mutasi dan Promosi Bidang

Mutasi dan Promosi pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyelenggarakan proses mutasi dan promosi, mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi, memverifikasi dokumen mutasi dan promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian, serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala, mempunyai tugas menyusun dan mengelola proses Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.



Badan Kepegawaian Daerah berfokus terkait dengan permasalahan terkait dengan penerapan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku serta dalam proses manajemen kinerja dengan penerapan pelaksanaan e-kinerja BKN.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakat tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Maluku tahun 2024 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini

2.1. Tujuan dan Sasaran RPD 2019-2024

Sebagai bentuk komitmen BKD Provinsi Maluku untuk mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tujuan dan sasaran dalam RPD Maluku yaitu:

- Misi Kesatu :
“ Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani ”
- Tujuan :
Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
- Sasaran :
Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, bersih dan melayani.



Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimaksud, BKD Provinsi Maluku mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) program prioritas yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2. Rencana Strategis BKD 2019-2024

Sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi BKD Provinsi Maluku sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku, dimana misi yang menjadi urusan BKD Provinsi Maluku adalah misi pertama yaitu “***Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani***”, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis BKD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi Maluku sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



GAMBAR 2.1
TUJUAN – SASARAN RPD DAN RENSTRA TAHUN 2019-2024



Tertuang dalam misi kelima Pemerintah Provinsi Maluku yang menjadi urusan dan kewenangan BKD Provinsi Maluku yaitu “***Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani***”, dengan indicator dan target sebagai berikut :



TABEL 2.1

Perbandingan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Renstra Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Layanan Kepegawaian yang Profesional (Tujuan Lama)	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian kepada ASN	Tersedia Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kelancaran tugas-tugas perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur	100 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org
			Peningkatan akuntabilitas laporan	1 dok	-	-	-	-	1 dok
			Jumlah Praja IPDN yang memperoleh pembinaan	75 org	105 org	-	105 org	-	105 org
			Persentase formasi CPNS sesuai kebutuhan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
			Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	80%	82.9%	83%	84%	85%	86%
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	6 PNS	8 PNS	10 PNS	12 PNS	14 PNS	16 PNS
			Simpeg Online yang terintegrasi	-	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota

TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN PADA RENSTRA PERUBAHAN

No	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN							
					2019		2020		TARGET KINERJA			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. (Tujuan Baru)	Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, bersih dan melayani	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	poin	-	-	-	-	-	-	250	270
2.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	Indeks	-	-	-	-	-	-	B	BB



2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi Maluku dengan Gubernur Provinsi Maluku tahun 2024 secara ringkas diilustrasikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.3

**Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	“Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	270 Poin
2	“Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”	Nilai SAKIP	BB



Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024 tersebut, BKD Provinsi Maluku melaksanakan 2 (dua) program dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 9.430.262.807,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Rp. 6.424.493.931	APBD
2	Kepegawaian Daerah	16	Rp. 3.095.848.876	APBD
TOTAL		35	Rp. 9.520.342.807	

capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauh mana penyimpangan maupun kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Untuk mengetahui informasi kinerja dan keuangan, maka secara sistematis pertanggungjawabanv(accountability) kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

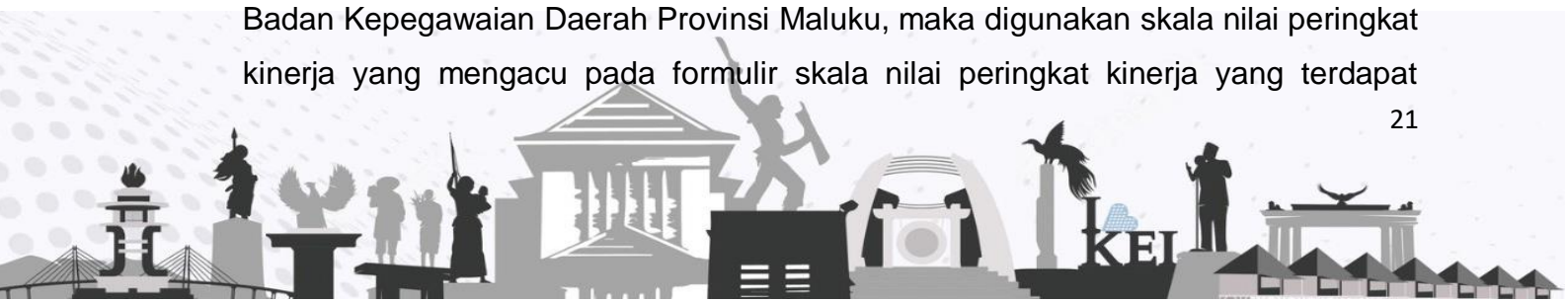
3.1.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program/kegiatan secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (feedback) merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus guna mencapai keberhasilan di masa mendatang. Hal ini artinya bahwa melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka program/kegiatan instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi serta dapat dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Bersandar pada penegasan dimaksud, maka diketahui bahwa komponen strategis pengukuran kinerja adalah pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja kegiatan maupun sasaran dalam kurun waktu tahun berjalan

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat



dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

TABEL 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan
2	>80-90	Memuaskan
3	>70-80	Sangat Baik
4	>60-70	Baik
5	>50-60	Cukup
6	>30-50	Kurang
7	0-30	Sangat Kurang

3.1.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja

1. Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku

Adapun Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut

SASARAN	“Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”
----------------	---

Hasil Pengukuran Sasaran Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani dapat dilihat pada tabel berikut



TABEL 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	270	251.5	93%	Memuaskan

TABEL 3.3
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2024 dengan
Realisasi Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Sasaran : "Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani"							
1	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	192 Poin	77%	209.5 Poin	84%	251.5	93%

TABEL 3.4
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2022, 2023 dan
2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
Sasaran : "Terwujudnya ASN Provinsi Maluku yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani"					
1	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	192 Poin	209.5 Poin	251.5	280 Poin



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BKD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang diukur berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 93% dan sudah mendapatkan predikat baik.

Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. 8 aspek penilaian indeks sistem merit antara lain : aspek perencanaan kebutuhan; aspek pengadaan; aspek pengembangan karier; aspek promosi dan mutasi; aspek manajemen kinerja; aspek penggajian, penghargaan dan disiplin; aspek perlindungan dan pelayanan; dan aspek sistem informasi kepegawaian.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2024, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024;

Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Maluku menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 270 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku sebesar 251.5 Poin dengan kategori “baik” serta dengan rincian sebagai berikut :



TABEL 3.5
Rincian Pencapaian per Aspek
Indeks Sistem Merit Tahun 2024

No.	Aspek	Realisasi 2024
1	Perencanaan Kebutuhan	35
2	Pengadaan	36
3	Pengembangan Karier	37.5
4	Promosi dan Mutasi	17.5
5	Manajemen Kinerja	65
6	Penggajian, penghargaan dan disiplin	32.5
7	Perlindungan dan Pelayanan Sistem Informasi	12
8	Kepegawaian	16
Total		251.5 Poin

Dari 8 (delapan) aspek penilaian yang digunakan, aspek Sistem Informasi dan aspek Promosi dan Mutasi memberikan kontribusi peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena BKD Provinsi Maluku telah menerapkan manajemen talenta dan membuat sistem informasi manajemen kinerja yang terukur dan objektif melalui aplikasi SiPinter. Sedangkan aspek pengembangan karir dan perencanaan kebutuhan perlu dipercepat pelaksanaan kebijakan. Berita Acara Evaluasi Sistem Merit oleh KASN kepada Pemerintah Provinsi Maluku kami sampaikan ***secara terlampir***

Penilaian dan Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ***Per April tahun 2024***, berdasarkan Keputusan Ketua KASN Nomor 03/KEP.KASN/C/IV/2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, **Provinsi Maluku mendapatkan Skor 251.5 Poin dengan Kategori baik. Namun pada Juni, KASN telah dilebur pada BKN dan KemenPAN-RB serta proses penilaian Sistem Merit akan dilimpahkan pada BKN dengan mekanisme yang diatur (dalam proses) hingga Periode Desember TA. 2024 tidak ada penilaian lanjutan untuk Sistem Merit.**



TABEL 3.8

Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi	Target	Target
Sasaran : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”					
1	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	B	BB	BB	BB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang Lingkup Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Menunjukkan Nilai **71.10** dengan predikat **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi **Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sudah sangat baik**, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.



TABEL 3.9
Rincian Hasil Evaluasi
SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	21.60	23.70
2	Pengukuran Kinerja	30	22.80	22.80
3	Pelaporan Kinerja	15	11.55	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10.60	14.10
Nilai Hasil Evaluasi		100	66.55	71.10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Dari 4 komponen yang dinilai Perencanaan kinerja memberikan kontribusi penilaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Hal tersebut dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku telah Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RENTRA yang sekanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya.

3.1.3. Aspek Sumber Daya

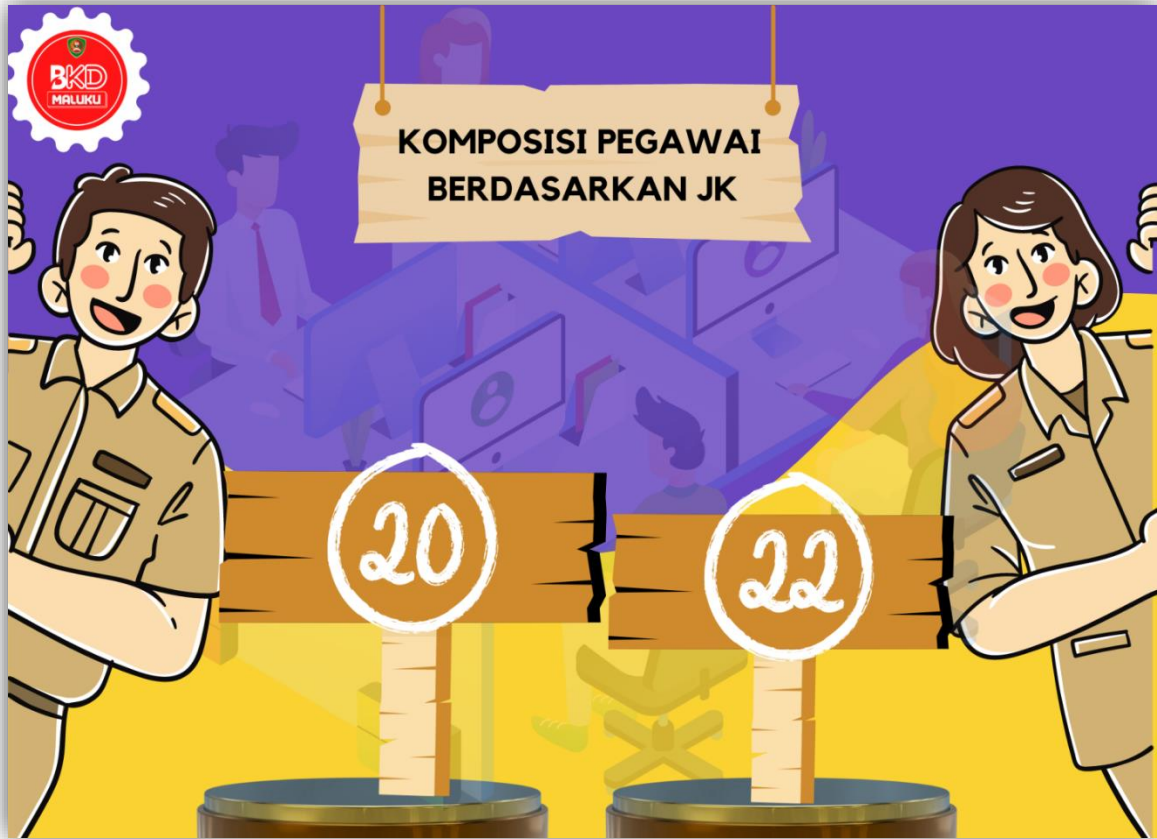
Dalam dalam mencapai target yang sudah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku didukung oleh Sumber Daya baik berupa Sumber daya Aparatur maupun Sarana Prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berdasarkan keadaan per Desember 2023 sebanyak 42 Pegawai (*Sumber Simpeg Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku*) dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin pangkat/Golongan, Jenjang Pendidikan dan Eselon sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :



a. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin :

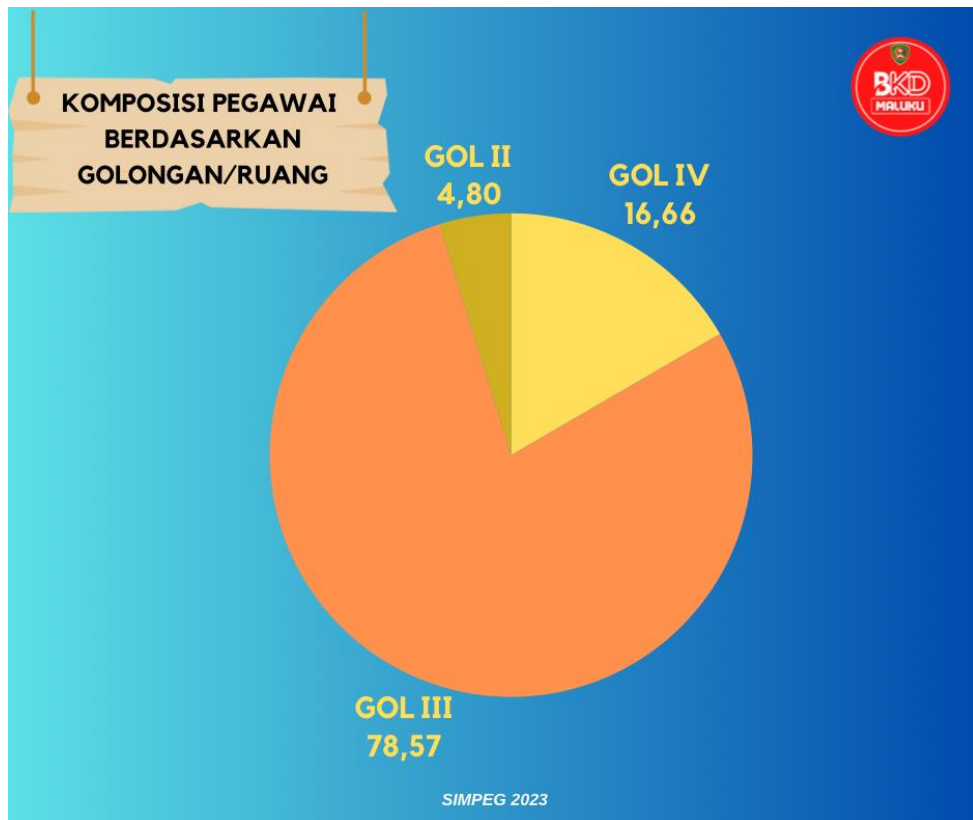
GAMBAR 3.1

Keadaan Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin



b. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Golongan:

GAMBAR 3.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BKD Menurut Golongan



c. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Jenis Pendidikan :

GAMBAR 3.3
Keadaan Pegawai BKD Menurut Tingkat Pendidikan



3.1.4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku didukung oleh 2 Program yaitu Program Penunjang dan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. 8 aspek penilaian indeks sistem merit antara lain : aspek perencanaan kebutuhan; aspek pengadaan; aspek pengembangan karier; aspek promosi dan mutasi; aspek manajemen kinerja; aspek penggajian, penghargaan dan disiplin; aspek perlindungan dan pelayanan; dan aspek sistem informasi kepegawaian.

Sesuai dengan Perka KASN, maka semua bidang berperan dalam menunjang ketercapaian dari target penerapan system merit melalui Program Kepegawaian Daerah dan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.



3.2. Realisasi Anggaran

TABEL 3.10

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.03.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 9,520,342,807	Rp 8,611,123,237	90.45	Rp 909,219,570	9.55
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 6,424,493,931	Rp 5,797,438,348	90.24	Rp 627,055,583	9.76
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 176,009,200	Rp 174,476,248	99.13	Rp 1,532,952	0.87
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 147,528,720	Rp. 145,995,768	98.96	Rp 1,532,952	1.04
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 9,490,200	Rp 9,490,200	100.00	Rp -	0.00
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 8,990,280	Rp 8,990,280	100.00	Rp -	0.00
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00	Rp -	0.00
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5,277,375,397	Rp 4,721,930,202	89.47	Rp 555,445,195	10.53
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,081,618,977	Rp 4,526,383,782	89.07	Rp 555,235,195	10.93



5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	57,360,000	Rp	57,360,000	100.00	Rp	-	0.00
5.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	10,000,120	Rp	10,000,120	100.00	Rp	-	0.00
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	100,000,100	Rp	100,000,100	100.00	Rp	-	0.00
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	28,396,200	Rp	28,186,200	99.26	Rp	-	0.74
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	142,096,000	Rp	118,015,708	83.05	Rp	24,080,292	16.95
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai	Rp	142,096,000	Rp	118,015,708	83.05	Rp	24,080,292	16,95
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	488,585,710	Rp	444,363,336	90.95	Rp	44,222,374	9.05
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,984,310	Rp	3,768,400	94.58	Rp	215,910	5.42
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	100,080,900	Rp	100,004,300	99.92	Rp	76,600	0.08
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	25,102,500	Rp	25,061,000	99.83	Rp	41,500	0.17
5.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	27,760,000	Rp	27,724,000	99.87	Rp	36,000	0.13
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	331,658,000	Rp	287,805,636	86.78	Rp	43,852,364	13.22
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	259,627,624	Rp	258,211,268	99.45	Rp	1,416,356	0.55



5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 689,873,800	Rp 456,314,927	66.14	Rp 233,558,873	33.86
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 86,487,250	Rp 79,925,946	92.41	Rp 6,561,304	7.59
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 103,386,600	Rp 87,154,626	84.30	Rp 16,231,974	15.7
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 499,999,950	Rp 289,234,355	57.85	Rp 210,765,595	42.15
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 310,473,950	Rp 304,028,125	97.92	Rp 6,445,825	2.08
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 225,125,100	Rp 224,034,600	99.52	Rp 1,090,500	0.48
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 85,348,850	Rp 79,993,525	93.73	Rp 5,355,325	6.27
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 399,150,511	Rp 381,597,385	95.60	Rp 17,553,126	4.4
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 109,504,000	Rp 102,887,600	93.96	Rp 616,400	6.04
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 57,635,921	Rp 56,277,241	97.64	Rp 1,358,680	2.36
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp 42,691,600	Rp 39,357,500	92.19	Rp 3,334,100	7.81
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 145,073,800	Rp 140,359,330	96.75	Rp 4,714,470	3.25
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Rp 44,245,190	Rp 42,715,714	96.54	Rp 1,529,476	3.46



3.3 Rencana Tindaklanjut

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh KASN, adapun langkah konkrit dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Maluku sebagai berikut:

No	Rencana Tindak
1.	Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan ASN ke aplikasi e-formasi
2.	Menyelesaikan pengusulan, pembahasan dan penetapan Pergub Pengadaan ASN dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum
4.	Melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Maluku tentang Laporan evaluasi pelaksanaan Latsar yang memuat hasil olah kuisioner dengan sasaran kepala perangkat daerah dan Atasan langsung terkait perkembangan kemampuan sebelum dan setelah pelaksanaan latsar
5.	Menyusun dokumen analisis kesenjangan kualifikasi terhadap JPT, administrator dan Pengawas
6.	Menyusun dokumen analisis kesenjangan kinerja
7.	Berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi Maluku untuk pemenuhan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Provinsi Maluku
8.	Memproses Draft Surat Edaran tentang <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> untuk ditandatangani oleh Gubernur Maluku
9.	Mengumpulkan SKP Tahun 2024 untuk setiap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana
10.	Menyelesaikan pengusulan, pembahasan dan penetapan Pergub Pemberiang Penghargaan bagi ASN dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum
11.	Penerapan aplikasi <i>Integrated Discipline</i> (IDIS) BKN
12.	Berkoordinasi dengan BAPPEDA terkait dengan rencana pengusulan terbentuknya UPT Assesment Center serta pembangunan Gedung Assesment Center



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi Maluku tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi Maluku tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja BKD Provinsi Maluku Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang kepegawaian.



RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
SEKRETARIAT/BIDANG	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan ASN	Nilai aspek perencanaan kebutuhan ASN	100	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4 Laporan & 2 Dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Penyusunan analisa kebutuhan ASN	√	√	√	√
		Nilai aspek pengadaan ASN								Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Laporan	Pengadaan ASN formasi tahun 2024	√	√
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								1 Laporan	Pelayanan pelaksanaan administrasi pensiun pegawai ASN		√	√	√	√
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								1 Laporan	Keikutsertaan KORPRI Provinsi Maluku dalam MTQ KORPRI Nasional Tahun 2024 dan Pelaksanaan Bimbingan Rohani bagi ASN Lingkup Pemprov Maluku		√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas sistem informasi layanan kepegawaian yang terintegrasi	Persentase akurasi data kepegawaian yang valid								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	Pengembangan aplikasi SIMPEG	√	√
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Sinkronisasi pemutahiran data pegawai ASN		√	√	√	√
Bidang Mutasi dan Promosi	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi berdasarkan Sistem Merit	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	50	Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	100%	Mutasi dan Promosi ASN		2 Dokumen & 1 Laporan	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Pelayanan perpindahan pegawai ASN	√	√	√	√	
									Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	Pelayanan kenaikan pangkat	√	√	√	√	
									Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Pengembangan Manajemen Talenta dan Pembentukan UPT Assesmen Center	√	√	√	√	
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karier Asn yang berdasarkan Sistem Merit	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Jumlah ASN yang lulus Uji Kompetensi	80%	Pengembangan Kompetensi ASN	2 Dokumen	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Pemberian bantuan tugas dan Izin Belajar bagi PNS	√	√					
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah serta fasilitas jabatan fungsional	√	√	√	√				
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengadaan	Meningkatnya kinerja dan Disiplin ASN yang berdasarkan Sistem Merit	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	150	Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di lingkungan	80%	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		3 Dokumen & 2 Laporan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring penyusunan SKP dan Sosialisasi E-Kinerja BKN	√	√	√	√	



SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
SEKRETARIAT/BIDANG	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan			Provinsi Maluku					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1 Laporan	Fasilitas Pelaksanaan Upacara Kedinasan bagi ASN yang Meninggal	√	√	√	√
										Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Laporan Tanda Jasa Bagi Pegawai	1 Laporan	Fasilitasi pengusulan Tanda Jasa bagi pengabdian PNS	√	√		
										Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN	1 Dokumen	Monitoring Disiplin ASN	√	√	√	√
										Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Disiplin ASN	1 Dokumen	Pelaksanaan BAP dan Penjatuhan Disiplin ASN	√	√	√	√
Sekretariat	Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah	BB, 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Realisasi Anggaran	80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen & 1 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	√			
		Presentase Pelaporan Keuangan yang tepat waktu pada Badan Kepegawaian Daerah								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rapat penyusunan dokumen RKA				√
	Meningkatkan ASN yang memiliki kesesuaian kompeten di Badan Kepegawaian Darah	Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah								Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rapat penyusunan dokumen perubahan RKA				√
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	Rapat penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	√			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	45 Orang, 3 Laporan & 2 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan keuangan	1 Laporan	Pemberian Lembur bagi Pegawai Sekretariat BKD				√
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Penyusunan laporan akuntansi	√	√	√	√
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun		√		



SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
SEKRETARIAT/BIDANG	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	√	√
					Persentase indikator program yang tercapai	90%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket, 1 Dokumen & 1 Laporan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	√	√	√	√
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√	√
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√	√
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√
					Indeks Kepuasan	70%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Pembayaran Jaringan Internet IndiHome	√	√	√	√
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Pembayaran Honorarium bagi Pegawai Non-ASN	√	√	√	√
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	2 Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	√

Anson, 8 Januari 2024
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI MALUKU.

Dra. H. J. SOAWOLE, M.Si
 NIP. 196508131992092001